

Digital News Book

KOMPAS

SERI
WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SRI SULTAN HB IX

TELADAN KEPEMIMPINAN

KOMPAS DATA



SRI SULTAN HB IX

TELADAN KEPEMIMPINAN



Copyright © 2018, Pusat Informasi Kompas

Diterbitkan dalam edisi digital
oleh **Penerbit Buku Kompas**, 2018
PT Kompas Media Nusantara
Jl. Palmerah Selatan 26-28
Jakarta 10270
email: buku@kompas.com

Tim Penyusun:
Litbang Kompas

Perancang Grafis:
Tim Penerbit Buku Kompas

Foto sampul:
Sri Sultan dan Rombongan disambut
meriah oleh rakyat di Bali (Desember 1949)
IPPHOS

eISBN: 978-602-412-492-2
KMN 581812092

KOMPASDATA

Jalan Palmerah Selatan 26 Jakarta 10270

Telp. (021) 5347710 ext. 220

Email: kompasdata@kompas.id

Website: kompasdata.id

Instagram & twitter: @KompasData



KOMPAS
PENERBIT BUKU

Jalan Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270

Telp. (021) 5347710 ext. 5601-5615

email: buku@kompas.com

facebook: Penerbit Buku Kompas

twitter @bukuKOMPAS

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip
atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Daftar Isi

- Pengantar 4
- Pemimpin di Waktu Krisis 5
- Maklumat Kesetiaan 11
- Dekat dan Dipercaya TNI 15
- Tipe Pemimpin yang Dibutuhkan 20
- Aristokrat Berjiwa Demokrat 26

Pengantar

A man of crisis menjadi julukan yang dipilih untuk menggambarkan peran dan jasa Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Ia ada pada saat-saat genting, bertindak cermat dan berani membela kepentingan bangsa. Wawasan dan pemikirannya yang jauh ke depan melatarbelakangi Sultan cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Bukan hanya pada masa perjuangan, tetapi juga pada awal pemerintahan Orde Baru. Namun, dalam sikap tegasnya, tetap terkandung sosoknya sebagai pengayom masyarakat.

Wibawa dan karismanya ditentukan bukan karena ia seorang raja, tetapi karena sikapnya yang merakyat. Ketegasan, ketulusan, dan orientasinya kerakyatannya diharapkan menjadi teladan dan mengilhami pemimpin-pemimpin bangsa dan kaum muda. Semoga kekhawatiran sejumlah orang, bahwa profil pemimpin seperti Sultan sudah berakhir, tidak terjadi.

Pemimpin di Waktu Krisis

Kalau membaca atau mendengar penuturan orang tentang Sultan Hamengku Buwono IX hati menjadi kagum. Ia luar biasa. Setelah kagum, pikiran mulai bertanya mengapa orang satu ini tidak mencuat dan dominan di anjungan kepemimpinan bangsanya?

Kalau direnungkan barangkali bisa disimpulkan bahwa Sultan itu adalah *a man of crisis*, tetapi tidak suka menonjol. Ia beberapa kali mendadak jadi satu-satunya orang yang tepat dan bisa untuk mengatasi suatu krisis yang genting dan tidak pula tanggung-tanggung menjalankan peranan itu. Ia mempertaruhkan keselamatan pribadi dan keluarganya. Ia kerahkan dana dan harta pribadi dan kesultanannya yang sebenarnya merupakan tabungan untuk kesejahteraan keluarga dan warga kesultanan di masa depan.

.....

Sri Sultan Hamengku Buwono IX
selalu hadir dengan kukuh dan peran
aktif penuh daya pada setiap episode
genting dalam sejarah bangsanya.
Namun, semuanya dilakukannya sebagai
tanggung jawab tugas, bukan untuk
tujuan pribadi.

.....

Karena itu, ia dengan luwes kemudian menyurutkan diri ke latar nonpolitik, seperti olahraga dan kepramukaan yang dicintainya. Ia pun menyeragamkan diri dengan lingkungan yang serba biasa dan menjauhi publisitas.

Dari banyak hal positif pada bangsawan yang demokratis dan merakyat ini barangkali kewibawaan pribadi dan kepercayaannya yang merupakan ciri terkuat kemuliaannya yang terus-menerus ia tempa.

Selama revolusi dan dasawarsa pertama kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX erat berhubungan dengan bidang keamanan dan masalah militer tanpa terlatih khusus dalam hal itu. Dia lahir dididik dan dipersiapkan untuk menjadi seorang raja. Sebagai itulah sebetulnya ia dirancang oleh ayah dan lingkungannya. Akan tetapi, ternyata selama sebagian besar masa hidupnya, ia bukan hanya memimpin dari atas. Ia berlaku lebih banyak sebagai pendorong rekan sekerja mengabdikan kepentingan

masyarakat sahabat orang biasa dan pengatur di belakang layar.

Penyelamat di Masa Krisis

Dalam konteks nasional, ia pantas disebut penyelamat republik pada masa krisis, dan promotor kepentingan Indonesia di forum internasional ketika Indonesia terkucil. Sri Sultan Hamengku Buwono IX atau Sultan Yogyakarta secara nasional mulai dikenal rakyat Indonesia pada awal revolusi.

Sehari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 Sri Sultan mengirim kawat kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Telegram itu antara lain berbunyi: “Sultan Yogyakarta mengucapkan selamat atas terbangunnya Negara Republik Indonesia dan terpilihnya Paduka yang mulia sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” Telegram senada juga dikawatkan Sultan kepada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Badan Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia.

Bersamaan dengan itu melalui corong radio setempat, Sultan juga berpidato menerangkan apa arti proklamasi itu. Di situ ia menyerukan warganya untuk: “Mencapai persatuan yang bulat dan kokoh sehingga bangsa Indonesia mendapatkan senjata untuk mempertahankan republiknya, agar dapat mempertanggungjawabkannya kepada generasi bangsa

Indonesia yang akan datang dan agar dapat membuat sejarah yang gemilang.”

Di lapangan, Sultan menjadi penganjur kantor resmi untuk mengibarkan bendera merah putih. Dan berkat hubungan yang baik dengan penguasa semasa pendudukan Jepang, *Kenpetai* juga membantu menurunkan bendera Hinomaru untuk diganti dengan merah putih.

Tawaran Tempat Pengungsian

Menjelang akhir 1945, situasi di Jakarta menjadi genting sekali karena sekutu menyatakan Jakarta sebagai salah satu tempat untuk pengumpulan bekas interniran Jepang dan pulau tahanan perang (bekas tentara Jepang). Untuk itu, diperlukan pengamanan oleh pasukan Sekutu. Jadi, di Jakarta akan ada ribuan tentara sekutu.

Sementara itu, tentara Belanda mulai juga mendarat dan merekrut eks-KNIL dan bekas interniran serta mempersenjatainya. Aparat keamanan Republik sendiri waktu itu baru polisi. Tentara sudah didirikan tetapi belum diatur, bahkan markas besarnya ada di Yogyakarta.

Keamanan pemimpin Republik dan keluarganya makin tidak terjamin. Karena itu, tidak ada pilihan lain

kecuali memindahkan kelompok pimpinan Republik keluar dari Jakarta. Namun, ke mana?

Sultan dari Yogyakarta mengikuti perkembangan ini dan dengan segera menawarkan Yogyakarta sebagai pusat dan tempat kedudukan pemerintahan Republik. Dengan adanya tawaran ini segera diatur “pengungsian” pimpinan dan pemerintahan Republik ke Yogyakarta.

Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta keluarga mereka dan sejumlah tokoh lain pada tanggal 3 Januari malam hari bertolak ke Yogyakarta dengan kereta api luar biasa yang berangkat dari belakang rumah kediaman Bung Karno (yang kemudian menjadi Gedung Proklamasi).

Dengan demikian, jadilah Yogyakarta sebagai pusat pengendalian Revolusi Kemerdekaan setelah lahir di Jakarta.

.....

Dalam pada itu Sultan tetap dengan cermat menempatkan diri sebagai “tuan rumah” yang tidak menonjolkan diri dalam lingkungan pusat kebijakan revolusi. Namun, ia akan bekerja keras kalau memang mendapat tugas di luar jabatan dan kedudukan sebagai kepala daerah.

.....

Dalam kabinet parlementer pertama, Sultan menjadi Menteri Negara dalam empat kabinet berlainan, antara November 1946 sampai Agustus 1949. Baru sesudah itu Sultan menjabat Menteri Pertahanan/Koordinator Keamanan dalam Kabinet Hatta II (kabinet RI terakhir sebelum penyerahan kedaulatan), berlanjut dalam Kabinet Hatta (semasa Republik Indonesia Serikat RIS), yang bubar September 1950.

Tanggung jawabnya sebagai tuan rumah ini ia jalankan terus bahkan semasa pendudukan Yogyakarta mulai 19 Desember 1948 sampai dengan 30 Juni 1949. Ia memberikan “sumbangan belanja” kepada keluarga para pemimpin yang ditawan di Bangka.

Diperkirakan tidak kurang dari 5 juta gulden Belanda “kerincing” simpanan perbendaharaan Kesultanan dibagikan oleh Sultan untuk menunjang kehidupan keluarga pemimpin yang ditawan maupun pegawai pemerintah yang selama beberapa bulan itu terpaksa tidak menerima gaji.

Dengan dana itu, Sultan bisa mencegah para pegawai terjerat “imbauan” pihak Belanda agar bekerja untuk pemerintah pendudukan. Memang, yang akhirnya bekerja adalah yang mendapat instruksi dari Sultan untuk melayani dinas yang vital bagi rakyat.

Sumber: “Pemimpin yang Pertaruhkan Segalanya di Waktu Krisis”.
Kompas, 09 Oktober 1988. Penulis: Rumhardjono.

Maklumat Kesetiaan

Pernyataan Sri Sultan HB IX bergabung dengan Negara Kesatuan RI, satu hari Proklamasi 17 Agustus 1945, bukanlah keputusan sesaat. Meskipun memiliki otonomi sendiri, tetapi dukungannya terhadap NKRI tidak bisa ditawarkan lagi dan sudah menjadi harga mati.

Sri Sultan memiliki salah satu ciri utama seorang pemimpin, yaitu keberanian serta kesanggupan untuk mengambil keputusan pada saat paling menentukan. Sebagai tindak lanjut atas komitmennya itu, Sultan segera membentuk Komite Nasional Indonesia di Yogyakarta. Dan dengan persetujuan KNI Sultan mengeluarkan maklumat 5 September 1945.

“Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat, menyatakan:

1. Bahwa Negeri Ngayogyakarta yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia.
2. Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan pemerintahan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan dan lainnya kami pegang seluruhnya.
3. Bahwa perhubungan antara negara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung dan kami bertanggung jawab atas negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaya segenap penduduk dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mengindahkan amanat kami ini.”

.....

Dari semua itu sudah jelas betapa jernih dan jauh pandangan Sultan.

.....

Pada 6 September, Presiden mengutus dua orang menteri negara RI, Mr. Sartono dan Mr. Maramis ke

Yogyakarta menyampaikan Piagam Kedudukan Sri Sultan.

Piagam itu berbunyi: “Kami, Presiden Republik Indonesia, menetapkan *Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono, Senopati ing Ngalogo Abdulrachman Sayidin Panotogomo, Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping IX ing Ngayogyakarta Hadiningrat* pada kedudukannya, dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Sultan akan mencurahkan segala pikiran tenaga jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Yogyakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.” Piagam itu tertanggal 19 Agustus dan ditandatangani Presiden Soekarno.

.....

Selama masa revolusi, ketika Yogyakarta menjadi ibu kota Republik dan pusat perjuangan bangsa Indonesia, Sultan membuktikan betapa sungguh-sungguh dia memenuhi kepercayaan yang diamanatkan piagam itu.

.....

Tindakan Sultan Yogyakarta segera diikuti rekan-nya Sri Paku Alam VIII, pemimpin wilayah Kadipaten Pakualaman yang menyatakan wilayah itu juga merupakan daerah istimewa Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya kemudian Kesultanan dan Pakualaman menjadi satu daerah istimewa, dengan Sultan sebagai kepala daerah dan Sri Paku Alam menjadi wakilnya. Dua orang ini kemudian menjadi tokoh dwi-tunggal Yogyakarta yang bukan saja erat dalam pekerjaan, tapi juga dalam hubungan pribadi.

Sumber: "Pemimpin yang Pertaruhkan Segalanya di Waktu Krisis".
Kompas, 09 Oktober 1988. Penulis: Rumhardjono.

Dekat dan Dipercaya TNI

Sejak awal revolusi Sultan selalu dekat dan dipercaya oleh TNI. Singgungan pertama kalangan militer Indonesia dengan Sultan barangkali terjadi ketika pada November 1945 berlangsung rapat para komandan dan divisi di Yogyakarta. Rapat itu adalah prakarsa Jenderal Oerip Soemohardjo, yang pada 20 Oktober 1945 diangkat oleh pemerintah pusat menjadi kepala staf umum Tentara Keamanan Rakyat.

Rapat itu diadakan karena Oerip merasa ada kekosongan dalam pimpinan ketentaraan. Supriyadi yang diangkat jadi pimpinan tertinggi TKR tidak pernah muncul, sedangkan Muhammad Suryoadikusumo yang ditunjuk sebagai menteri keamanan *ad interim* tak pernah menduduki jabatan itu.

Pada rapat inilah Jenderal Soedirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, dan para komandan itu memilih Sultan Hamengku Buwono IX sebagai menteri pertahanan. Padahal, hak untuk memilih menteri itu ada pada perdana menteri (setelah RI melakukan konvensi ketatanegaraan, UUD 1945 menganut sistem kabinet presidensial. Namun, karena pertimbangan strategi politik untuk “mengambil hati” sekutu, dilakukan sistem kabinet parlementer dengan KNIP didekritkan sebagai badan legislatif). Akan tetapi, pemerintah pusat, kemudian PM Sjahrir, mengabaikan keinginan dan pencalonan pihak tentara itu dan mengangkat Mr. Amir Syarifuddin sebagai menteri pertahanan.

Itu menjadi bibit ketegangan antara “pejuang bersenjata” yang bergerak di front dengan kaum politisi yang menguasai kebijakan politik melalui KNIP. Apalagi setelah kaum elit politik itu, dipelopori PM Sjahrir, menjalankan “politik diplomasi” dengan Belanda. Ketegangan sering kali berubah menjadi kecurigaan.

Perkembangan sejarah membuktikan politik diplomasi itu hampir selalu berakhir dengan kerugian republik, dan disusul pengingkaran persetujuan oleh pihak Belanda, berlanjut dengan penyerbuan dan pendudukan Yogyakarta pada 19 Desember 1948.

Bisa dipahami bagaimana sikap dan emosi tentara dan pejuang bersenjata terhadap para tokoh politik yang menjalankan kebijakan diplomasi itu. Dalam kondisi beginilah semua pihak berpaling kepada satu orang, yaitu Sultan. Apalagi ia telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang tidak berhasil dikalahkan dan dipermainkan Belanda selama pendudukan Yogyakarta.

.....

Hubungan dekat dan kepercayaan dari tentara ini menempatkan Sultan pada posisi vital untuk mengatasi krisis yang berkaitan dengan keamanan dan ketegangan antara elit politik dan tentara.

.....

Dalam bulan Agustus, PM Hatta harus bertolak menuju Belanda untuk mengepalai delegasi RI dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan Belanda dan pihak BFO (kelompok negara bagian buatan Belanda).

Di belakang layar segera timbul persoalan, siapa yang akan menggantikannya selama Bung Hatta pergi. Apa lagi nantinya pejabat PM itulah yang akan menerima serah terima pemerintahan di Indonesia dari tangan Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta.

Dalam keadaan normal, ini bukan persoalan politik. Namun, bagi kalangan tentara ini penting, setidaknya secara psikologis, sebab kalangan ini masih “emosional” dan ada keinginan agar kekuasaan tersebut jangan diserahkan kepada orang yang pernah menyerah, dan juga ada sikap tidak bersedia diperintahkan orang yang demikian. Memang kedengarannya hal itu “kekanak-kanakan”, tetapi patut diingat bahwa pimpinan dan kebanyakan tentara dan pejuang bersenjata ketika itu usianya baru antara belasan sampai dua puluh tahunan.

Pribadi Sultan, dengan segala kewibawaannya, juga penting untuk memecahkan masalah yang lebih teknis militer. Sebagai konsekuensi dari persetujuan KMB, maka bekas tentara Belanda yang tergabung dalam KNIL harus ditampung dan diserap oleh Angkatan Perang RIS.

Persoalan pertama adalah bagaimana mengusahakan agar di daerah bekas wilayah BFO nantinya, pimpinan APRIS setempat dipegang orang TNI dan bukan oleh bekas KNIL. Kedua, di daerah di mana perjuangan bersenjata terutama dilakukan pasukan

non-TNI, perlu diplomasi khusus agar mereka itu menerima kepemimpinan orang TNI.

Di sinilah kewibawaan, ketajaman, intuisi, daya menilai situasi atau orang, dan “konduite perjuangan” selama revolusi, serta integritas pribadi menjadi lebih penting dibandingkan dengan kecerdasan intelektual jabatan atau pangkat.

Dan satu-satunya orang yang ternyata memenuhi syarat itu semuanya ternyata hanyalah Sultan Hamengku Buwono IX.

Sumber: “Pemimpin yang Pertaruhkan Segalanya di Waktu Krisis”.
Kompas, 09 Oktober 1988. Penulis: Rumhardjono.

Tipe Pemimpin yang Dibutuhkan

Apakah tipe pemimpin seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX itu dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini? Delapan dari sepuluh orang yang ditanya **Kompas** menjawab pasti: ya. Kuatnya situasi emosional mungkin cukup membuat responden terpengaruh dalam memberikan jawaban.

Banyak responden menangis terharu ketika **Kompas** mewawancarai mereka. Seorang bapak setengah tua, yang mengaku berasal dari Cilacap, menyatakan ia benar-benar kehilangan idola. Walaupun dia bukan orang Yogyakarta, tapi ia merasakan daya tarik yang kuat pada kepribadian dan kepemimpinan Sultan. “Sungguh sayang mengapa Sultan pergi begitu cepat. Kita sangat membutuhkan orang macam beliau,” katanya dengan suara agak parau.

Gambaran ini memang tidak sepenuhnya mewakili seluruh masyarakat Indonesia karena *Kompas* mengadakan jajak pendapat terbatas di wilayah Yogyakarta dengan responden sebanyak 500 orang.

Mereka terdiri dari pegawai negeri, karyawan swasta, pensiunan ABRI, guru/ dosen, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan petani. Kebanyakan pendidikan mereka cukup tinggi. Jumlah mereka yang pendidikannya SMA ke atas sekitar 30 persen, SMA sebanyak 36 persen. Sisanya adalah tamatan SMP, SD, dan buta huruf.

Pengayom Rakyat

Seluruh kegiatan selama hidup Sultan dipersembahkan untuk negara semata. Dari aktivitas politik, menjadi menteri sampai wapres, berlanjut dalam kegiatan olahraga sebagai ketua KONI, sampai ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Dalam bidang budaya, Sultan unggul menciptakan berbagai tarian, yang terkenal tari Golek Menak. Keterlibatan Sultan dalam banyak aspek kehidupan masyarakat membuat masyarakat menjadi sangat dekat, apalagi tindakannya benar-benar sangat dirasakan menyangkut kepentingan rakyat banyak.



💖💖
**...Dengan tiadanya
sultan, hampir
seluruh responden
tanpa ragu
menjawab kehi-
langan sesuatu...**

Karena itu, ketika *Kompas* bertanya bagaimana perasaan Anda dengan tiadanya sultan, hampir seluruh responden tanpa ragu menjawab kehilangan sesuatu.

“Sekarang ini saya merasa di lingkungan masyarakat kita ada sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang memberi inspirasi dan perasaan *ayem* telah tiada,” kata seorang mahasiswa, salah seorang responden. “Kelihatannya profil pemimpin seperti Sultan yang kerakyatan ini sudah berakhir dan tak akan muncul lagi dalam situasi masyarakat seperti ini,” lanjutnya.

Pendapat mahasiswa itu seakan mewakili jawaban responden ketika mereka ditanya apakah masyarakat Indonesia sekarang ini dapat menampilkan pemimpin seperti Sultan lagi? Maka yang diperoleh adalah pandangan yang cenderung pesimistis. Sekitar 60 persen menyatakan bisa, tapi sangat sulit, dan lebih kurang 16 persen beranggapan masyarakat Indonesia tak akan lagi dapat memunculkan pemimpin seperti Sultan.

.....

Sri Sultan sering dijuluki sebagai *a man of crisis*, artinya manusia yang selalu dapat menyelesaikan suatu masalah yang gawat dengan tepat dan cara yang memuaskan hati semua pihak.

.....

Misalnya sewaktu situasi tidak menentu di Yogyakarta saat sekitar Februari 1949, ketika penderitaan rakyat bertambah parah dan perlawanan terhadap musuh melesu. Dalam situasi seperti itu, Sultan bukannya terpengaruh, tetapi malah terdorong untuk berbuat sesuatu dan akhirnya bersama dengan Letkol Soeharto, Presiden RI periode 1966-1998, berhasil menyusun suatu serangan, yang kemudian harus dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret.

Demikian juga Sultan banyak memegang peranan penting dalam krisis negara sewaktu masih menganut sistem banyak partai sekitar tahun 1950-an.

Tak berlebihan sebanyak 94 persen responden menjawab bahwa kehadiran Sultan dalam suatu masalah selalu dapat memberikan arah penyelesaian.

Lalu, apakah keberhasilan Sultan sebagai pemimpin disebabkan kedudukannya sebagai raja? Tidak tepat benar. Hanya 26 persen responden yang menjawab Sultan berhasil sebagai pemimpin karena semata-

mata kedudukannya sebagai raja. Responden lebih banyak mengatakan bahwa Sultan sukses sebagai pemimpin karena Sultan adalah raja yang merakyat. Mereka yang mengatakan hal ini sekitar 88 persen. Ini konsisten dengan jawaban masyarakat ketika ditanya sebenarnya apa fungsi raja atau Sultan bagi Anda? Jawaban yang paling besar mengatakan sebagai pengayom rakyat (90 persen), pelindung rakyat, dan orang yang dekat dengan kawulanya.

Kekurangan Sultan

Adalah tidak etis membicarakan kekurangan atau kesalahan orang yang sudah meninggal. Kata pepatah Romawi, yang tertinggal dari yang mati hanyalah kemuliaan, apa lagi membicarakan celah dari seorang raja. Karena itu *Kompas* meletakkan permasalahan ini pada posisi yang nisbi. Artinya, bertanya mengenai suatu kekurangan yang sifatnya setiap manusia tak terlepas dari keterbatasan.

Menurut masyarakat, kekurangan Sultan yang paling besar adalah bersifat selalu mengalah (29,86 persen). “Kalau Sultan mau sedikit lebih agresif, ada beberapa kondisi sosial politik yang akan menjadi lebih baik dari sekarang,” kata Tri, seorang wiraswasta muda.

Namun, ada juga responden yang mengatakan Sri Sultan mengalah itu sesungguhnya untuk menang. “Dan yang jelas,” lanjutnya, “beliau itu tidak suka menyakiti hati orang lain. Sedapat mungkin keputusan yang dibuat memuaskan semua pihak. Konsekuensinya beliau memang lebih banyak diam atau mengalah.”

Bagi orang yang kurang begitu memahami pandangan atau filsafat Jawa, hal ini tentu agak sulit dicerna. Orang Jawa selalu meletakkan keselarasan dan kerukunan pada tatanan nilai tertinggi. Sultan dengan sangat konsekuen memegang nilai itu.

Bagaimana dengan perkawinannya dengan Ny. Norma, yang sempat membuat heboh masyarakat waktu itu? Ketika hal ini ditanyakan pada masyarakat apakah itu kekurangan atau bukan, ternyata 22 persen—yang berarti kekurangan nomor dua dari empat kekurangan yang lain—menganggapnya sebagai suatu kekurangan. Bagi masyarakat Jawa, perkawinan itu bila dikerangkakan dalam budaya Jawa memang dapat dianggap “perkawinan dengan putri seberang”. Namun, dari sisi lain, hal itu justru semakin mengokohkan Sultan sebagai orang yang rasional, berpendidikan Barat, dan milik nasional, dan dalam kenyataannya Sultan memang telah menjadi milik kita bersama bukan milik satu golongan tertentu.

Sumber: “Sultan Hamengku Buwono IX: Tipe Pemimpin yang Dibutuhkan Masyarakat Sekarang”. *Kompas*, 09 Oktober 1988.

Penulis: Bambang Sigap Sumantri.

Aristokrat Berjiwa Demokrat

“Saya tetap orang Jawa,” begitu ungkapan GRM Dorodjatun, lulusan Universitas Leiden, Belanda, dalam penobatannya sebagai Sultan Hamengku Buwono IX, 18 Maret 1940, yang kemudian menjadi penanda perubahan pemerintahan Kesultanan Yogyakarta.

Walaupun ia didikan Belanda, Sultan Hamengku Buwono IX bukan saja pendukung Republik, tetapi juga seorang pembaru masyarakat yang lebih maju dari pemerintahan Republik.

Sultan HB IX dikenal sebagai pembaru sistem politik pemerintahan dari monarki absolut menjadi demokrasi-aristokrasi. Menjelang wafat, sang raja tidak meniru pendahulunya, dengan meninggalkan

Keris Jaka Piturun kepada salah satu keturunannya sebagai tanda ahli waris takhta.

Penobatan KGPH Herjuno Darpito, yang kemudian menjadi KGPH Mangkubumi dan selanjutnya menjadi pimpinan Keraton Yogyakarta sebagai Sri Sultan HB X, merupakan hasil musyawarah internal para *rayi dalem* (adik-adik kandung-Red), *sedherek dalem* (adik lain ibu), dan *sentana dalem* (paman, bibi, dan sepupu). Musyawarah para aristokrat itu menggantikan model penunjukkan langsung.

Sultan HB IX merupakan aristokrat berjiwa demokratis, pendobrak nilai tradisional yang berpijak pada visi politiknya, “Takhta untuk Rakyat”. Jiwa pembaharu Sultan HB IX ditunjukkan dengan membangun demokratisasi dari tingkat desa.

Dukungan Kepala Desa

Pemilihan kepala desa secara langsung menjadi sebuah proses politik di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Kesultanan Yogyakarta. Diben-tuk pula Dewan Desa sebagai kontrol politik terhadap kepala desa saat itu, selain juga ada Lembaga Rukun Kampung.

Kabupaten diberi otonomi dalam pemerintahan dan pembangunan. Yogyakarta lebih dulu memiliki mekanisme demokrasi ketika daerah lain, bahkan

republik ini, belum punya pemerintahan modern. Konsep Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang ada dalam tata pemerintahan sekarang diadopsi dari demokrasi ala Mataram itu (*Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Selo Soemardjan, 1986). Kepala desa yang dipilih rakyat sampai kini tetap mengikat diri pada Keraton sebagai atasan meskipun desa bukan lagi bawahan Keraton, tetapi bagian dari sistem pemerintahan Republik.

Itu sebabnya, ketika para kepala desa membentuk paguyuban seperti Bodronoyo (Kulon Progo), Suryondadari (Sleman), Tungguljati (Bantul), dan Semar (Gunung Kidul), organisasi nonformal itu menyokong kedudukan dan “politik” Keraton Yogyakarta di bawah HB X dalam sejumlah peristiwa politik. Posisi organisasi itu jelas sebuah cerminan praksis terminologi struktur kekuasaan Jawa: hubungan raja dan rakyat adalah hubungan raja dan hambanya.

.....

Ketika DIY mengalami gonjang-ganjing, mempertahankan statusnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun 2003, paguyuban Ismoyo secara terbuka menyatakan dukungan kepada Sultan yang juga Gubernur DIY agar status DIY dipertahankan, dan agar Sultan otomatis menjadi gubernur dipertahankan.

.....

Dalam pandangan kepala desa itu, ciri pokok keistimewaan DIY adalah jabatan ganda gubernur dan Sultan dalam satu figur. Mereka mendukung agar gubernur ditetapkan, tidak dipilih oleh DPRD DIY.

Keempat paguyuban yang mengambil nama dari tokoh Semar itu bergabung dalam paguyuban kepala desa se-DIY, bernama Ismoyo (nama lain dari Semar). Tokoh Semar dalam pewayangan sebenarnya adalah dewa yang sakti, tetapi memiliki karakter sebagai pamong (pengasuh, pembimbing), yang suka mengemong bendara (mengasuh tuannya) maupun rakyat.

Dalam sebuah *pisowanan* (datang untuk menghadap), para kepala desa meminta diperkenankan memakai lencana Keraton sebagai bukti bahwa mereka selalu di belakang Keraton, menjadi pendukung loyal Sultan. “Itu menggambarkan wujud pengabdian kami kepada rakyat dan kepada Sultan Yogyakarta,” ujar Prayogo, Ketua Paguyuban Semar.

Sultan Milik Rakyat

Daya politik paguyuban itu memang cukup kuat dalam percaturan politik. Tahun 2004, para pamong desa itu lagi-lagi berbondong-bondong ke Kepatihan (Kantor Gubernur-Red) dan memohon kepada Sultan

HB X agar bersedia membatalkan niatnya ikut Konvensi Partai Golkar.

Paguyuban yang masih percaya adagium *vox rei vox dei* (suara raja adalah suara Tuhan) itu menghendaki Sultan tetap sebagai raja yang tak boleh terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik parsial.

.....

“Sultan adalah milik rakyat Yogyakarta, kami tidak rela ia menjadi milik sekelompok golongan saja, Raja harus netral agar keputusannya selalu tetap berpihak pada rakyat,” ucap Prayogo yang juga menjabat Kepala Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Gunung Kidul.

.....

Para kepala desa pun tak ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) karena tidak ingin lepas dari Keraton. Saat para carik mulai sibuk memperjuangkan diri untuk diangkat sebagai PNS, Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (Apdesi) di Bantul, misalnya, tetap memilih berstatus non-PNS.

Alasannya sederhana, status ini tidak diperlukan supaya kepala desa tetap menjadi corong masyarakat, bukan corong pemerintah. “Nantinya desa pasti akan

selalu *ewuh pakewuh* (sungkan-Red) ke pemerintah,” tutur Jiyono, Ketua Apdesi Bantul.

Gaji kepala desa tidaklah sepadan jabatannya. Dengan tanah bengkok seluas 4,5 hektar dan pendapatan lain berupa tunjangan perangkat desa Rp 57.500 dan dana kesejahteraan Rp 100.000, mereka hanya mendapat gaji sekitar Rp 600.000 per bulan. Namun, bagi para kepala desa itu, kebanggaan menjadi pamong-praja dan pengabdian untuk Keraton tidak bisa dinilai dengan uang.

Sumber: “Demokrasi ala Mataram”.
Kompas, 03 Desember 2005. Penulis: Irma Tambunan,
Erwin Edhi Prasetya, Ari Susanto.

KOMPAS DATA

kompasdata.id